

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sengketa Laut China Selatan merupakan salah satu sengketa yang krusial dan belum terselesaikan hingga saat ini. Sengketa yang dimulai sejak tahun 1947 ini terjadi antara China, Taiwan, serta beberapa negara Asia Tenggara yaitu Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Negara-negara tersebut mengklaim kedaulatannya di wilayah Laut China Selatan berlandaskan hukum laut internasional yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dan hukum nasional yang bersumber dari sejarah masing-masing negara.

Selain atas dasar hukum yang digunakan, kegigihan negara-negara tersebut dalam berjuang menuntut kedaulatannya di wilayah Laut China Selatan dikarenakan potensi-potensi yang dimiliki seperti letak Laut China Selatan yang strategis. Dikatakan strategis karena wilayah Laut China Selatan merupakan rute tersibuk di dunia sehingga menjadikan negara yang mempunyai kedaulatan atas wilayah di Laut China Selatan akan sangat untung karena kapal-kapal yang menghubungkan belahan dunia melewati jalur ini. Selain dari aspek strategisnya, kekayaan alam yang terdapat di Laut China Selatan juga sangat melimpah dengan diperkirakan jumlah cadangan minyak mentah yang terkandungnya mencapai

17,7 miliar ton. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan perikanan terkaya di dunia. Pada tahun 2015, *World Wildlife Fund, Resource Scarcity in the South China Sea* menyatakan bahwa Laut China Selatan merupakan kawasan yang telah menyediakan kebutuhan akan sumber daya hayati (ikan) sekitar 10% secara global.<sup>1</sup>

Potensi-potensi wilayah Laut China Selatan yang menguntungkan semakin memicu ke-6 negara tersebut untuk memperjuangkan wilayah kedaulatannya berdasarkan hukum-hukum yang dianut masing-masing negara. Namun permasalahannya ialah hukum-hukum yang dianut tumpang tindih, antara hukum laut internasional (UNCLOS) serta hukum nasional beberapa negara. Tidak adanya patokan pasti yang diakui ke-6 negara tersebut menjadikan masing-masing negara bertindak sesuai apa yang dianut. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan atas dasar ingin mengeksploitasi potensi Laut China Selatan untuk kepentingan nasional negaranya, tetapi karena hukum yang tumpang tindih tersebut tidak jarang terjadi pertikaian di wilayah ini.

Salah satu insiden yang cukup parah terjadi antara Vietnam dan China. Tahun 1988 kedua pihak juga bentrok dan menewaskan 70 pasukan Vietnam. Filipina juga terlibat dalam ketegangan kecil dengan pasukan China. Lalu para pejabat Beijing mengeluarkan pernyataan keras, termasuk peringatan kepada negara lain yang mengklaim untuk menghentikan eksplorasi mineral di kawasan Laut China Selatan. Filipina menuduh China menyusun kekuatan militer di Spratly (kepulauan bagian selatan LCS). Klaim ini menyebutkan angkatan laut

---

<sup>1</sup> David Reed, *In Pursuit of Prosperity: South China Sea Chapter Summary*, World Wild Life, diakses dalam <https://www.worldwildlife.org/publications/in-pursuit-of-prosperity-south-china-sea-chapter-summary> (9 November 2018).

China sengaja mensabotase dua operasi eksplorasi Vietnam yang menimbulkan protes anti-China terbesar di jalan-jalan Hanoi dan Ho Chi Minh. Selain itu, Vietnam juga telah mengadakan latihan militer dengan peluru tajam di lepas pantai mereka dan China menganggap tindakan Vietnam tersebut sebagai upaya provokasi.<sup>2</sup>

Sejak tahun 1956 hingga 2016, terdapat 80 peristiwa ketegangan antar berbagai negara-negara yang mengklaim haknya di Laut China Selatan. Seperti Taiwan yang pada 6 Juni 1956 menempatkan pasukannya secara permanen di salah satu bagian wilayah tersebut yaitu Pulau Aba. Taiwan merupakan negara pertama yang melakukan tindakan tersebut. Peristiwa berikutnya terjadi pada tahun 1970 yang mana Filipina mengklaim lima bagian di wilayah barat Kepulauan Spratly. Setelah klaim sepihak Filipina tersebut, Vietnam pada tahun 1974 memasukkan enam bagian di wilayah Kepulauan Spratly sebagai teritorialnya yang mengakibatkan terjadi insiden "*Battle of the Paracel Islands*" antara China dan Vietnam Selatan. Kurang lebih 36 personel dari kedua negara tewas dalam kontak senjata. Seiring dengan agresivitas China yang didorong oleh peningkatan kemampuan ekonomi dan militer, lebih dari 60% insiden ketegangan di LCS baru terjadi pada tahun 2000 ke atas. Bahkan China semakin agresif membangun sejumlah infrastruktur militer di LCS seperti pelabuhan, landasan pacu pesawat

---

<sup>2</sup> Anonim, *Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan*, diakses dalam [https://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2011/07/110719\\_spratlyconflict](https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict) (9 November 2018).

tempur terutama di Kepulauan Spratly. Situasi tersebut pada akhirnya memicu ketegangan dan konflik di LCS.<sup>3</sup>

Agresivitas China tersebut juga didukung oleh kebijakan reformasi militer dengan tujuan meningkatkan kekuatan militernya pada Desember 2016. Komisi Pusat Militer China melakukan perubahan Tentara Pembebasan Rakyat menjadi kekuatan militer kelas dunia yang ditargetkan tercapai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 juga pihak China menargetkan untuk menyelesaikan seluruh mekanisme dan membuat kemajuan dalam teknologi informasi dan komputer. Prioritas dalam kebijakan ini yaitu pada rekonstruksi beberapa tugas yang mencakup persenjataan dan logistik, informasi teknologi, pelatihan pertempuran serta kerja sama militer internasional. China juga mengurangi jumlah pasukan, menambah anggaran militernya serta memperbanyak investasi di persenjataan modern guna menyiapkan pasukan yang siap tempur. Beijing diperkirakan akan memberi fokus besar pada Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai respon dari sengketa Laut China Selatan yang belum terselesaikan hingga kini.

Tindakan-tindakan agresif China di Laut China Selatan membuat negara-negara yang juga mengklaim kedaulatannya di wilayah ini merasa tidak aman. Contohnya pada tahun 2013, Filipina menuding China mencampuri wilayah kedaulatannya melalui penangkapan ikan serta reklamasi pulau buatan di wilayah Kepulauan Spratly. Upaya yang dilakukan Filipina dalam menyelesaikan kasus tersebut ialah dengan mengajukan kasus ini kepada Arbitrase Internasional. Pada tahun 2016, Arbitrase Internasional didukung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa

---

<sup>3</sup> Ali Maksum, *Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan*, Jurnal Sospol, Volume 3 Nomor 1 (2017), Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 20.

memutuskan bahwa berdasarkan UNCLOS China telah melanggar kedaulatan Filipina di Kepulauan Spratly dengan menangkap ikan dan mereklamasi untuk membuat pulau buatan. Namun China menolak keputusan Arbitrase Internasional dengan mengeluarkan *whitepaper* yang menyatakan bahwa klaim Filipina tidak mempunyai dasar. Menurut China nelayan mereka telah berlayar, menemukan dan menamai pulau-pulau di Laut China Selatan bahkan sejak 2000 tahun lalu.<sup>4</sup>

Upaya lainnya dalam usaha menyelesaikan konflik Laut China Selatan ini ialah melalui media ASEAN. Pada 4 November 2002, China bersama ASEAN menyelenggarakan *Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea* (DOC) yang ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja. Dalam deklarasi ini, China dan ASEAN berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati *freedom of navigation* di Laut China Selatan, menyelesaikan sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik. Sejatinya DOC merupakan pedoman bertindak bagi negara anggota ASEAN dan China dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan dengan semangat kerja sama dan saling percaya. Namun, pada kenyataannya DOC tidak sepenuhnya bekerja efektif dalam upaya penyelesaian konflik ini karena DOC bukanlah sebuah perjanjian mengikat bagi pihak yang menandatangani.<sup>5</sup> DOC dilihat hanya sebagai landasan moral negara-negara yang berkonflik di LCS bertindak.

---

<sup>4</sup> Denny Armandhanu, *China Sebut Klaim Filipina di Laut China Selatan Tak Berdasar*, CNN Indonesia, diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160713112655-113-144459/china-sebut-klaim-filipina-di-laut-sengketa-tidak-berdasar>, (4 Desember 2019).

<sup>5</sup> Tri Nuke Pudjiastuti dan Pandu Prayoga, *ASEAN dan Isu Laut China Selatan: Transformasi Konflik Menuju Tata Kelola Keamanan Regional Asia Timur*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 12, Nomor 1 (Juni 2015), Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hal. 101.

Ketidakefektivan DOC membuat ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara menginisiasi untuk membentuk *Code of Conduct* (COC). COC adalah perjanjian tertulis tentang pengaturan perilaku negara secara efektif sehingga dapat mencegah terjadinya konflik di Laut China Selatan. Perundingan *Code of Conduct* (COC) ini telah mulai sejak tahun 2012 tetapi belum ditemukan jalan keluar karena salah satu negara ASEAN yaitu Kamboja tidak setuju dengan adanya COC karena menganggap sengketa Laut China Selatan bukan merupakan urusan ASEAN tetapi negara-negara yang bersengketa. Selain itu Kamboja juga mendukung China yang ingin menyelesaikan masalah Laut China Selatan ini secara bilateral. Perundingan *first reading* COC baru selesai 24 Juli 2019 lalu di Penang dan masih ada beberapa tahap selanjutnya.

Meskipun ASEAN telah beberapa kali mengambil peran sebagai mediator dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan, namun China memaparkan bahwa ingin konflik ini diselesaikan melalui kerja sama bilateral. Seperti yang dinyatakan Presiden China, Xi Jinping kepada Presiden Filipina, Rodrigo Duterte bahwa China mengajak Filipina untuk secara aktif memikirkan kerja sama maritim dan meningkatkan interaksi positif di laut menjadikan LCS sebagai kesempatan untuk kerja sama bilateral. Selain menawarkan Filipina, Jinping juga menawarkan Presiden Vietnam, Tran Dai Quang, yang mana Jinping mengatakan bahwa China dan Vietnam harus menyelesaikan sengketa melalui konsultasi bilateral dan dialog, mengedepankan kerja sama dengan menangguhkan perbedaan serta terlibat dalam pembangunan bersama dan mengatasi permasalahan untuk perdamaian maupun ketenangan regional. Tawaran tersebut



dilontarkan China pada 20 November 2016 lalu saat KTT Asia Pacific Economic Cooperation di Peru.<sup>6</sup>

Hubungan bilateral yang dimaksud dapat berupa kerja sama, negosiasi, konsultasi dan sebagainya dengan syarat tetap mengedepankan kepentingan serta menjaga perdamaian dan hal tersebut hanya dalam lingkup bilateral (dua aktor) saja. Strategi hubungan bilateral ini telah sejak lama dilakukan oleh China. Misalnya antara China dan Vietnam, yang pada 2011 lalu dalam *Joint Steering Committee* di Hanoi. Dalam pertemuan ini kedua pihak juga membahas mengenai penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Pada saat itu China diwakili oleh Penasihat Kenegaraannya yaitu Dai Bingguo dan Vietnam diwakili oleh Perdana Menteri Nguyen Thien Nhan. Hasil yang disepakati dari pertemuan ini tentang konflik Laut China Selatan ialah kedua pihak akan menyelesaikan sengketa dengan cara damai, baik itu melalui negosiasi maupun konsultasi serta akan meningkatkan implementasi DOC.

Selain dengan Vietnam, China juga melakukan hubungan bilateral dengan Filipina. Salah satu contohnya ialah pada tahun 2011, Presiden Hu Jintao mengundang Presiden Filipina Benigno Aquino III berkunjung ke Beijing. Sama halnya dengan Vietnam, dalam undangan tersebut kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa Laut China Selatan dengan damai guna menjaga perdamaian serta menjunjung tinggi nilai-nilai DOC.

---

<sup>6</sup> Berlianto, *Soal LCS, China Desak Penyelesaian Secara Bilateral*, diakses dalam <https://international.sindonews.com/read/1156787/42/soal-lcs-china-desak-penyelesaian-secara-bilateral-1479622949>, (4 November 2019).

Apabila dilihat pola strategi China dalam meraih kepentingannya di Laut China Selatan ini sangat dinamis. China tidak segan menggunakan kekuatan militer namun kadang sikap China seolah mengedepankan langkah-langkah diplomasi atau penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Namun paparan Presiden China, Xi Jinping, bahwa China ingin menyelesaikan konflik LCS melalui hubungan bilateral menjadi salah satu patokan yang kuat bahwa meskipun China bertindak agresif di lapangan namun China akan tetap berpegang teguh pada anti kekerasan dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis akan menganalisa alasan strategi pendekatan diplomasi bilateral China dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan pembahasan dalam sebuah penelitian dibutuhkan rumusan masalah. Penelitian ini akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu *mengapa China mengedepankan pendekatan diplomasi bilateral dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan?*

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan China menggunakan pendekatan diplomasi bilateral dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan.
2. Untuk memahami interaksi China dengan negara-negara yang juga mengklaim wilayah Laut China Selatan melalui upaya pendekatan diplomasi bilateral sebagai usaha penyelesaian konflik.
3. Untuk mengetahui sejarah serta dinamika konflik Laut China Selatan.



4. Untuk mengetahui dan menjelaskan kepentingan-kepentingan China di Laut China Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi pada pembaca serta menjadi rujukan referensi terkait dinamika konflik Laut China Selatan dan kepentingan-kepentingan maupun strategi pendekatan diplomasi bilateral Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap keilmuan HI khususnya dalam kajian *foreign policy*, politik internasional, Asia Tenggara, Asia Timur, serta resolusi konflik.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan informasi-informasi maupun referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait konflik Laut China Selatan. Selain itu juga untuk menjelaskan alasan China lebih ingin konflik Laut China Selatan diselesaikan melalui pendekatan diplomasi bilateral.

## **1.5 Penelitian Terdahulu**

Menganalisis penelitian-penelitian terdahulu merupakan hal yang perlu dilakukan untuk menunjang kredibilitas dari sebuah penelitian. Untuk itu penulis menganalisis beberapa penelitian terdahulu yang meliputi pembahasan yang serupa, tentang kepentingan serta strategi China dalam menguasai wilayah Laut China Selatan, tetapi mempunyai sasaran analisis yang berbeda.

Penelitian Hendy Rizal Muhammad membahas tentang efektivitas dari strategi China dalam menguasai Laut China Selatan khususnya setelah putusan Badan Arbitrase Internasional pada Juli 2016 lalu yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan Tiongkok telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut China Selatan. Selain itu dijelaskan pula secara umum mengenai bagaimana strategi China dalam menguasai Laut China Selatan yaitu dengan menggunakan sarana diplomatik, militer dan ekonomi. China menyatakan bahwa konflik ini lebih baik diselesaikan secara bilateral daripada melalui perdebatan di organisasi regional seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan KTT ASEAN. Meskipun demikian, strategi China ini dinilai tidak efektif karena masalah keamanan regional Laut China Selatan yang kompleks, meliputi adanya perimbangan kekuatan baik internal maupun eksternal, dilema keamanan di kawasan Laut China Selatan dan evolusi sistem persenjataan negara-negara di kawasan Laut China Selatan.<sup>7</sup>

Dalam penelitian Ali Maksum, penulis mendapati bahwa regionalisme Asia Tenggara sedang mengalami tantangan serius karena lemahnya multilateral dan kelemahan tersebut dimanfaatkan China dalam menguasai Laut China selatan. Kelemahan tersebut yaitu adanya *ASEAN-way* yang mana mengharuskan negara-negara ASEAN menganut prinsip non intervensi dan konsensus. Hal ini dimanfaatkan China dalam ASEAN Regional Forum dan ASEAN pun tidak dapat

---

<sup>7</sup> Hendry Rizal Muhammad, *Efektivitas Strategi Republik Rakyat Tiongkok dalam Menguasai Laut China Selatan Pasca Putusan Badan Arbitrase Internasional 2016*, JOM FISIP, Volume 4, Nomor 2 (Oktober 2017), Riau: Universitas Riau, hal.2.

berperan banyak dalam membantu anggotanya menyelesaikan konflik Laut China Selatan selain mediator.<sup>8</sup>

Melalui penelitian Athanasius Aditya Nugraha dijelaskan tentang motivasi-motivasi yang melatarbelakangi tindakan-tindakan China yang ingin menguasai Laut China Selatan yaitu adanya sumber hidrokarbon dan jalur pelayaran yang strategis. Selain itu juga dianalisis apa-apa saja yang dilakukan China untuk menguasai Laut China Selatan. Pendekatan resmi China dalam menyelesaikan konflik ini yaitu dengan negosiasi akan tetapi negosiasi China bukan untuk menyelesaikan masalah kedaulatan karena China mengklaim wilayahnya sendiri di Laut China Selatan sehingga negosiasi ini hanya untuk pengaturan sementara bukanlah menentukan kedaulatan. Adanya kekuatan-kekuatan yang mulai menyeimbangkan dominasi China seperti ASEAN dan hukum-hukum internasional UNCLOS membuat China mengalami hambatan dan mengandalkan prinsip negosiasi bilateral.<sup>9</sup>

Dalam penelitian Tri Nuke Pudjiastuti dan Pandu Prayoya, penulis mendapati bahwa melalui pendekatan transformasi konflik, penelitian ini menganalisis sejauh mana konflik Laut China Selatan. Selain itu juga dijelaskan posisi China yang dominan dalam bertindak untuk menguasai wilayah laut cina selatan. Terdapat kebijakan-kebijakan perlindungan kedaulatan China di wilayah LCS yang meliputi pengeluaran *the location map of the south China Sea island* (1947); *Declaration on the Teritorial Sea* (September 1958); *Law on the*

---

<sup>88</sup> Ali Maksum, *Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan*, Jurnal Sospol, Volume 3, Nomor 1 (Januari-Juni 2017), Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 21.

<sup>9</sup> Athanasius Aditya Nugraha, *Manuver Politik China dalam Konflik Laut China Selatan*, Jurnal Pertahanan, Volume 1, Nomor 2 (Oktober 2011), hal. 62-63.

*Teritorial Sea and Contiguous Zone* (Februari 1992); ratifikasi UNCLOS (Mei 1996); pemerintah China mengeluarkan empat deklarasi yang mana satu diantaranya untuk menegaskan kembali artikel 2 *Law on the Teritorial Sea and Contiguous Zone*: kedaulatan China atas kepulauan Pratas, kepulauan Paracel, Macclesfield Bank, dan kepulauan Spratly; *Declaration on Baselines of Teritorial Sea*; dan *Law on the Exklusive Economic Zone and the Continental Shelf* (Juni 1998). Dijelaskan pula usaha-usaha ASEAN dalam meredam konflik LCS yang salah satunya menggunakan peningkatan kerja sama di ASEAN +3.<sup>10</sup>

Melalui penelitian Setyasih Harini dijelaskan bahwa klaim China terhadap Laut China Selatan yang semakin lama terlihat begitu agresif dilatarbelakangi oleh kepentingan nasionalnya. Pertama, dari segi ekonomi menunjukkan keberhasilan modernisasi yang dimulai dari masa Deng Xiaping hingga sekarang. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat yang disertai dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat tentu membutuhkan sumber energi yang semakin besar. Sumber energi terutama energi alam dari dalam negeri semakin lama tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Beijing perlu mencari sumber alam alternatif dari luar negeri. Laut Cina Selatan berdasarkan berbagai penelitian menunjukkan adanya kekayaan alam yang melimpah sehingga dapat dijadikan sebagai sumber energi di masa mendatang. Dengan terpenuhinya energi baru untuk pembangunan ekonomi (faktor internal), China dapat memposisikan negaranya sebagai “*the big power*” untuk kawasan regional dan internasional. Dengan berhasilnya klaim

---

<sup>10</sup> Tri Nuke Pudjiastuti dan Pandu Prayoga, *ASEAN dan Isu Laut China Selatan: Transformasi Konflik Menuju Tata Kelola Keamanan Regional Asia Timur*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 12, Nomor 1 (Juni 2015), Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hal. 112-114.

teritorial Laut Cina Selatan dapat diartikan bahwa terintegrasi kembali wilayahnya sebab Taiwan juga terlihat sebagai negara pengklaim. Padahal Taiwan selama ini tidak diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat dengan semboyan “satu China”. Terakhir Laut Cina Selatan yang selama ini telah ramai dilalui kapal asing sebagai jalur komunikasi dan perdagangan internasional dapat dimungkinkan sebagai halaman belakang China. Artinya dengan alasan dan pengalaman sejarah, China berhak menggunakan perairan itu sebagai pertahanan guna menghadapi penetrasi dan invasi yang mungkin timbul dari negara-negara lain.<sup>11</sup>

Penelitian selanjutnya merupakan skripsi dari Maharadis Juanda yang membahas tentang alasan Kamboja menolak pembentukan COC (*Code of Conduct*) pada tahun 2012. Melalui penelitian tersebut diketahui bahwa alasan Kamboja menolak karena Kamboja memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan ASEAN disebabkan hal tersebut dapat mengganggu hubungan bilateralnya dengan China. Kamboja tidak ingin bilateralnya dengan China terganggu disebabkan ketergantungan pada investasi China yang mencapai 60% dari total investasi asing di Kamboja.<sup>12</sup>

Selanjutnya yaitu penelitian dari Carlyle A. Thayer yang berupa jurnal internasional tentang tindakan-tindakan agresif China di Laut China Selatan dan respon Filipina dan Vietnam. Agresivitas China tersebut membuat hubungan bilateralnya dengan Filipina maupun Vietnam terganggu. Upaya-upaya yang

---

<sup>11</sup> Setyasih Harini, *Kepentingan Nasional China dalam Konflik Laut Cina Selatan*, Electronic Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Volume 14, Nomor 21 (2011), Surakarta: Universitas Slamet Riyadi Surakarta, hal. 48-49.

<sup>12</sup> Maharadis Juanda, *Analisis Sikap Penolakan Kamboja dalam Proses Pembentukan COC (Code of Conduct) ASEAN dalam Menangani Konflik di Laut Tiongkok Selatan Tahun 2012*, SKRIPSI. Malang: Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 42.

dilakukan Filipina meliputi melakukan *lobbying* dengan anggota ASEAN diantaranya yaitu Indonesia dan Brunei Darussalam, ikut serta dalam mediasi ASEAN modernisasi angkatan bersenjata, hingga menghidupkan kembali kerja sama pertahanannya dengan Amerika Serikat. Sedangkan respon Vietnam dalam menanggapi agresivitas China diantaranya yaitu mengajukan protes diplomatik, ikut maupun dalam mediasi ASEAN. Filipina dan Vietnam pun masing-masing menggunakan pendekatan bilateral dengan China yang umumnya merupakan konsultasi bilateral.<sup>13</sup>

Berikutnya melalui penelitian Ign. Agung Satyawan diketahui bahwa dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui negosiasi khususnya yang dilakukan ASEAN dan China, meliputi negosiasi melalui diplomasi jalur I (jalur formal) maupun melalui negosiasi jalur II (jalur informal). Tolak ukur keberhasilan negosiasi tersebut ialah disepakatinya *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC). Selain itu, ukuran saling percaya diri (*confidence building measures*) diantara peserta sengketa juga sudah mulai terbangun meskipun tumpang tindih yuridiksi masih terjadi. Pasca disepakatinya DOC pun negosiasi belum dapat menyelesaikan konflik namun dapat meredam konflik khususnya saat terjadi ketegangan. Negara-negara yang terlibat konflik LCS sepakat bahwa konflik ini tidak menjadi penghalang jalinan kerja sama karena para aktor sepakat bahwa hubungan baik antara China dan peserta sengketa

---

<sup>13</sup> Carlyle A. Thayer, *Chinese Assertiveness in the South China Sea and Southeast Asian Responses*, Journal of Current Southeast Asian Affairs, Volume 30, Nomor 2 (2011), German: Institute of Global Area Studies, hal. 96-97.



lainnya, terutama hubungannya dengan ASEAN adalah jauh lebih penting daripada esensi sengketa di Laut China Selatan.<sup>14</sup>

Penelitian Muhar Junef membahas tentang latar belakang serta dinamika konflik Laut China Selatan hingga peran ASEAN dalam penyelesaian konflik tersebut. berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa konflik Laut China Selatan merupakan konflik antar negara sehingga upaya penyelesaiannya tidak saja pada aspek historis (sejarah) dan hukum tetapi juga melalui pendekatan perundingan secara damai. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada para pihak yang bersengketa di Laut Tiongkok Selatan untuk menyiapkan agenda penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur hukum maupun membicarakannya melalui forum-forum bilateral dan multilateral yang telah ada.<sup>15</sup>

No	Nama Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Teori	Hasil
1.	Hendy Rizal Muhammad	2017	Efektifitas Strategi Republik Rakyat Tiongkok dalam Menguasai Laut China Selatan Pasca Putusan Badan Arbitrase Internasional 2016	<i>Balance of Power dan Maritime Security</i>	Penelitian ini membahas tentang efektivitas dari strategi China dalam menguasai Laut China Selatan khususnya setelah putusan Badan Arbitrase Internasional tahun 2016. Selain itu penelitian milik Rizal ini juga memaparkan salah satu bentuk upaya penyelesaian konflik

<sup>14</sup> Ign. Agung Satyawan, *Komunikasi Negosiasi China terhadap Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan*, Jurnal Komunikasi Massa, Volume 3 Nomor 2 (Juli 2010), hal. 18-19.

<sup>15</sup> Muhar Junef, *Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 18 Nomor 2 (2016), Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, hal. 219-220.

					<p>Laut China Selatan khususnya antara China dan Filipina melalui Arbitrase Internasional.</p> <p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas strategi China dalam upaya menguasai LCS tetapi penelitian ini fokus pada efektif tidaknya strategi tersebut sedangkan penulis tidak membahas tentang efektivitas melainkan mencari alasan China yang menginginkan konflik LCS diselesaikan melalui pendekatan diplomasi bilateral.</p>
2.	Ali Maksum	2017	Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan	Konsep Aliansi	<p>Penelitian ini membahas tentang strategi China yang dalam upaya menguasai Laut China Selatan serta posisi ASEAN dalam konflik tersebut. Selain itu penelitian ini menjelaskan tentang salah satu upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan yaitu dengan mediasi dari ASEAN. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu melihat</p>

					dinamika Laut China Selatan.
3.	Athanasius Aditya Nugraha	2011	Manuver Politik China dalam Konflik Laut China Selatan	<i>Deffensive Realism</i>	Penelitian ini menjelaskan tentang motivasi-motivasi China dalam menguasai LCS beserta strateginya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang strategi China serta kepentingan-kepentingan China di LCS. Meskipun demikian, penulis hanya fokus pada strategi pendekatan bilateral China.
4.	Tri Nuke Pudjiastuti dan Pandu Prayoya	2015	ASEAN dan Isu Laut Cina Selatan: Transformasi Konflik Menuju Tata Kelola Keamanan Regionalisme Asia Timur	Transformasi Konflik	Penelitian ini menganalisis sejauh mana eskalasi konflik Laut China Selatan serta posisi China yang dominan dalam konflik tersebut. Disamping itu, penelitian ini juga memaparkan ASEAN sebagai penyedia wadah dalam upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah membahas strategi China serta dinamika dari konflik Laut China Selatan.
5.	Setyasih Harini	2012	Kepentingan Nasional	Kepentingan Nasional	Penelitian ini membahas tentang

			China dalam Konflik Laut China Selatan		apa-apa saja kepentingan nasional China dalam konflik Laut China Selatan serta strateginya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang kepentingan-kepentingan China di Laut China Selatan dan strategi yang digunakan China walaupun penulis lebih fokus karna hanya menganalisa satu strategi.
6.	Maharadis Juanda	2018	Analisis Sikap Penolakan Kamboja dalam Proses Pembentukan COC ( <i>Code of Conduct</i> ) ASEAN dalam Menangani Konflik di Laut Tiongkok Selatan Tahun 2012	<i>Stug Hunt Game Theory</i> dan Teori Regionalisme	Penelitian ini membahas tentang alasan Kamboja menolak pembentukan COC pada tahun 2012. Meskipun fokus penelitian ini pada Kamboja namun penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi penulis yang berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui mediasi ASEAN serta dinamika konflik LCS. Disamping itu penelitian ini juga berkontribusi dalam menyediakan data tentang strategi persuasif China

					dalam upaya mencapai kepentingan nasionalnya.
7.	Carlyle A. Thayer	2011	<i>Chinese Assertiveness in the South China Sea and Southeast Asian Responses</i>		Penelitian ini membahas tentang agresivitas China di Laut China Selatan serta respon Filipina dan Vietnam terhadap tindakan-tindakan China tersebut. selain itu juga membahas tentang upaya penyelesaian konflik yang telah dijalankan yaitu dengan mediasi ASEAN, pengajuan surat protes diplomatik, hingga konsultasi bilateral. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah penulis hanya fokus pada upaya pendekatan diplomasi bilateral saja yang tidak hanya meliputi konsultasi bilateral serta ditinjau dari perspektif China.
8.	Ign. Agung Satyawan	2010	Komunikasi Negosiasi China terhadap Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan	Konsep Negosiasi	Penelitian ini membahas mengenai negosiasi sebagai upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan, khususnya negosiasi yang di mediasi oleh ASEAN. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian

					penulis ialah fokus strategi China yang penulis bahas hanya bilateral meskipun penulis juga akan menyinggung upaya-upaya lain yang dilakukan dalam penyelesaian konflik LCS yang salah satunya mencakup penelitian Agung Satyawan ini.
9.	Muhar Junef	2018	Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan		Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji tentang latar belakang serta dinamika konflik Laut China Selatan. Selain itu juga mengkaji peran ASEAN dalam ikut serta dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut. Penelitian ini menjadi salah satu rujukan penulis dalam mengkaji konflik Laut China Selatan khususnya dinamika. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih fokus mengkaji dari perspektif ASEAN sedangkan penulis lebih fokus pada perspektif China.
10.	Inggar Wilda Aulia	2020	Alasan China Menyelesaikan Konflik Laut China Selatan	Politik Luar Negeri Model Strategik	Penelitian penulis ini membahas mengenai alasan China



			melalui Pendekatan Bilateral		mengedepankan pendekatan diplomasi bilateral dalam upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan. Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai model interaksi antara China dan <i>claimed states</i> Asia Tenggara pada konflik Laut China Selatan.
--	--	--	------------------------------	--	--

## 1.6 Kerangka Teori

### 1.6.1 Politik Luar Negeri Model Strategik / Model Rasional

Politik Luar Negeri menurut James Rosenau ialah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi serta memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya dengan tujuan memelihara maupun mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Selain itu menurut K.J Holsti, lingkup dari politik luar negeri yaitu semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya untuk memperoleh keuntungan dan hirau kondisi internal akan menopang perumusan kebijakan tersebut. Kebijakan dalam politik luar negeri ini bersumber dari lingkungan eksternal negara misalnya pola aliansi. Lalu dapat juga bersumber diinternal negara tersebut yakni masyarakat, pemerintahan, maupun nilai-nilai yang dianut.<sup>16</sup>

Merumuskan politik luar negeri dapat dimaknai sebagai tindakan memilih alternatif yang ada dengan berbagai ketidakpastian. Namun rasionalitas dalam

<sup>16</sup> Ibid, hal. 43- 57.

perumusan politik luar negeri terjadi ketika aktor pembuat keputusan memilih alternatif terbaik dari banyaknya alternatif yang tersedia. Dengan demikian, tersedia berbagai model dalam perumusan politik luar negeri ini, salah satunya yaitu Model Strategik atau biasa disebut dengan Model Rasional.<sup>17</sup>

Untuk menganalisa strategi pendekatan diplomasi bilateral China sebagaimana digunakan untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan, penulis menggunakan teori *foreign policy* menurut John P. Lovell yang mana merujuk pada bukunya tahun 1970 dengan judul *Foreign Policy in Perspective*.

Lovell memaparkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu kebijakan luar negeri yaitu kapabilitas yang dimiliki oleh negara tersebut, persepsi elit, strategi negara-bangsa lain, dan struktur sistem internasional.<sup>18</sup>

1. Kapabilitas suatu negara

Dalam merumuskan kebijakan luar negeri, negara harus memperhitungkan kapabilitas negara tersebut. Dengan mengetahui seberapa besar kapabilitas negaranya akan berfungsi sebagai pembanding dengan kapabilitas negara lain sehingga ketika terjalin hubungan nantinya telah diperhitungkan juga seberapa besar dampaknya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

2. Persepsi elit.

Hal ini merupakan kalkulasi atau perhitungan dari elit politik pemerintahan negara tersebut. Para pembuat kebijakan memperhitungkan

---

<sup>17</sup> Ibid, hal. 60-63.

<sup>18</sup> John P. Lovell, 1970, *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*, New York: The Dryden Press, Hal 98-101.

kebijakan atau strategi tersebut apakah nanti akan memberikan kerugian atau keuntungan bagi negaranya.

3. Strategi negara-bangsa lain.

Perhitungan selanjutnya dalam perumusan kebijakan luar negeri menurut Lovell yaitu dengan mempertimbangkan strategi negara lain atau negara lawan. Tidak hanya strategi negaranya namun juga strategi negara lain harus dipertimbangkan, terutama politik internasional.

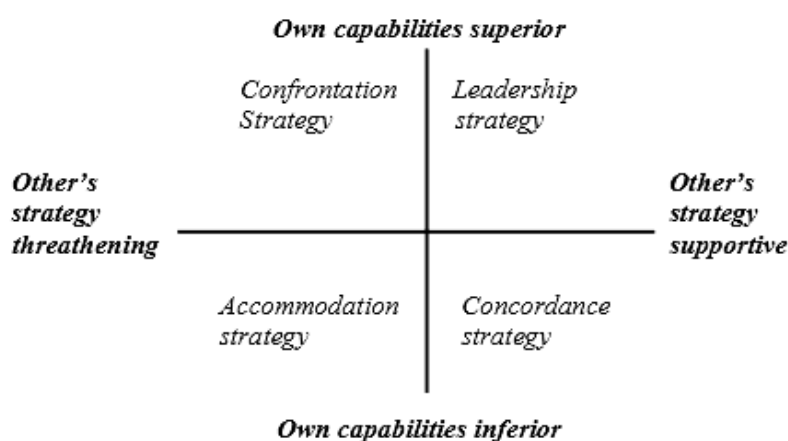
4. Struktur sistem internasional.

Struktur internasional juga harus dipertimbangkan ketika membuat kebijakan luar negeri. Dalam struktur internasional, negara-negara dapat melakukan proses negosiasi ataupun kerja sama guna meraih kepentingan nasional mereka. Kegiatan-kegiatan tersebut digunakan untuk meraih keuntungan atau setidaknya mengurangi resiko kerugian.

Berdasarkan empat faktor tersebut dapat dilihat corak interaksi antar negara yaitu *leadership strategy*, *concordance strategy*, *confrontation strategy* dan *accommodative strategy*.

*Leadership Strategy* ialah adanya posisi pengawasan melalui cara persuasi maupun tawar-menawar daripada cara kekerasan dikarenakan suatu negara menganggap memiliki power lebih dibandingkan negara lain yang hanya sebagai pendukung. *Concordance strategy* adalah pola interaksi yang mana mengacu pada adanya suatu kepentingan saling menguntungkan. Hal ini dikarenakan negara A merasa memiliki power lebih kecil dibandingkan negara B, maka negara A akan senantiasa menjalin hubungan harmonis dengan negara B maupun mengambil

keputusan yang selaras dengan negara B. Sedangkan dalam *confrontation strategy*, negara B akan mencoba mempertajam isu-isu yang mengandung konflik dengan negara A sehingga mendorong negara A untuk mengakui superioritas dari negara B. Dengan adanya hal tersebut juga membuat negara A membuat strategi penyesuaian atau *accommodative strategy* demi menghindari konflik dengan negara B. Kemudian tidak menutup kemungkinan negara A nantinya akan melakukan *confrontation strategy* ketika powernya meningkat.<sup>19</sup>



Gambar 1.1 Model-Model Interaksi dari Kebijakan Luar Negeri

Dalam bukunya *Foreign Policy in Perspective*, Lovell (1970) memaparkan bahwa konteks “*leadership*” tersebut berarti mengontrol dengan cara persuasi dan tawar-menawar yang mana sedikit banyak juga akan bersinggungan dengan cara koersi dengan syarat cara koersi tersebut dikombinasikan dengan bentuk persuasi lainnya. Negara A berhasil menerapkan model *leadership strategy* ini apabila negara B dapat mengikuti inisiatif atau “aturan main” negara A. Dengan demikian negara B akan mengikuti tindakan-tindakan yang mendukung tercapainya kepentingan negara A.

<sup>19</sup> Ibid.

Penulis akan menganalisa 4 faktor diatas terlebih dahulu yang mana meliputi kapabilitas China dan Vietnam, Filipina, Malaysia serta Brunei Darussalam, persepsi elit politik China, strategi negara-negara yang berkonflik dengan China di Laut China Selatan, dan struktur sistem internasional saat itu. Berdasarkan analisa faktor-faktor tersebut penulis akan melihat corak interaksi yang muncul sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai alasan China ingin konflik Laut China Selatan diselesaikan melalui pendekatan diplomasi bilateral.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan model interaksi *Leadership Strategy* dalam menganalisis strategi pendekatan diplomasi bilateral China untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan. Model tersebut menggambarkan pola China di Laut China Selatan yang bersikap agresif namun disisi lain ingin konflik LCS diselesaikan dengan damai. Berdasarkan model interaksi *leadership strategy*, melalui pendekatan diplomasi bilateral China ingin Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam mengikuti inisiatif maupun aturan main China yang mana disisi lain tindakan-tindakan ini akan mendorong China mencapai kepentingannya di Laut China Selatan.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan bersifat eksplanatif yang mana penulis melalui tulisan ini berupaya menganalisa suatu peristiwa dengan menggunakan konsep yang ada sehingga dapat menjelaskan fenomena tersebut. dalam penelitian ini akan dijelaskan kepada pembaca yaitu tentang alasan China ingin konflik Laut China Selatan diselesaikan melalui pendekatan diplomasi bilateral.

### **1.7.2 Tingkat Analisa**

Tingkat analisa yang penulis gunakan yaitu berada pada tingkat negara-bangsa karena dalam topik ini penulis hanya menganalisis salah satu kebijakan China dalam pergerakannya dalam konflik Laut China Selatan.

### **1.7.3 Variabel Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu dependen dan independen. Variabel dependen merupakan variabel yang dianalisis atau yang dipengaruhi oleh variabel independen, sebaliknya variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Alasan China mengedepankan pendekatan diplomasi bilateral merupakan variabel dependen, dan pendekatan diplomasi bilateral dalam menyelesaikan konflik LCS sebagai variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini berada pada level negara sedangkan variabel independen pada level sistem. Dengan demikian hubungan kedua variabel tersebut adalah induksionis yang mana variabel independen levelnya lebih tinggi dari pada variabel dependen.

### **1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan dalam penelitian lebih fokus dan terorganisir, maka dibutuhkan ruang lingkup. Ruang lingkup berfungsi sebagai pembatas dari isu-isu dan pembahasan. Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan yaitu:

1. Membatasi pembahasan dari tahun 2013 hingga 2019. Penelitian ini dibatasi hanya pada masa pemerintahan Xi Jinping karena Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa China ingin menyelesaikan konflik Laut China Selatan secara bilateral namun pada era Xi Jinping ini pula China semakin



bertindak agresif di Laut China Selatan. Selain itu penulis juga membatasi penelitian ini hanya sampai 2019 karena konflik Laut China Selatan masih berlangsung meskipun dinamikanya bersifat dinamis.

2. Pembahasan mengenai negara-negara yang berkonflik dengan China dalam perebutan kedaulatan di Laut China Selatan adalah negara di Asia Tenggara saja yang meliputi Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Penelitian ini tidak membahas Taiwan dikarenakan China tidak mengakui Taiwan sebagai negara.

#### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Data-data yang ada untuk membentuk penelitian ini berupa data primer dan sekunder diperoleh melalui metode studi kepustakaan. Data primer diperoleh dari web maupun dokumen resmi sedangkan data-data sekunder tersebut berasal dari buku, jurnal, skripsi, media online, serta dokumen-dokumen lain yang mendukung dalam menganalisis topik ini.

#### **1.7.6 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif deduktif yang mana penulis akan menganalisa data dengan cara mereduksi data kemudian membuat kesimpulan. Mereduksi data ialah memilah data-data yang relevan dengan topik penelitian lalu menyederhanakan data tersebut, serta membuang data yang tidak selaras dengan tujuan penelitian. Data-data yang telah terseleksi tersebut kemudian diolah serta dianalisa lalu ditarik kesimpulan.

### 1.8 Hipotesa Penelitian

Berdasarkan teori politik luar negeri Lovell, China menginginkan konflik Laut China Selatan diselesaikan melalui pendekatan diplomasi bilateral karena ingin terciptanya kondisi aman bagi China di wilayah sengketa yang diwujudkan dalam interaksi *leadership strategy*. Aman disini berarti meskipun dasar klaim China tidak diakui dunia internasional tetapi China tetap dapat melangsungkan kepentingan nasionalnya di LCS. Pernyataan tersebut dianalisa berdasarkan beberapa faktor yaitu: (1) China memiliki kapabilitas (*power*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan masing-masing *claimant states* sehingga dengan pendekatan diplomasi bilateral China akan unggul dalam *competition* resolusi konflik LCS ini; (2) Pendekatan diplomasi bilateral selaras dengan konsep “Mimpi China” serta adanya pengaruh dari kaum moderenis dalam elit politik China; (3) *Claimant states* Asia Tenggara dapat bersatu menggunakan ASEAN sehingga memunculkan power baru untuk menyaingi China di LCS; (4) Intervensi Amerika Serikat juga merupakan kekuatan lain yang dapat menyaingi upaya dominasi China. Apalagi Amerika Serikat merupakan negara dengan power yang besar seperti China.

### 1.9 Sistematika Penulisan

<b>BAB I Pendahuluan</b>	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Akademis 1.4.2 Manfaat Praktis 1.5 Penelitian Terdahulu 1.6 Kerangka Teori 1.6.1 Politik Luar Negeri Model Strategik / Model Rasional
------------------------------	---

	1.7 Metode Penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>1.7.1 Jenis Penelitian</li> <li>1.7.2 Tingkat Analisa</li> <li>1.7.3 Variabel Penelitian</li> <li>1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian</li> <li>1.7.5 Teknik Pengumpulan Data</li> <li>1.7.6 Teknik Analisa Data</li> </ul> 1.8 Hipotesa Penelitian
<b>BAB II</b> <b>Gambaran</b> <b>Konflik LCS</b> <b>dan</b> <b>Pendekatan</b> <b>Diplomasi</b> <b>Bilateral China</b>	2.1 Gambaran Konflik Laut China Selatan 2.2 Pendekatan Diplomasi Bilateral China dengan Masing-Masing <i>claimant states</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.2.1 Pendekatan Diplomasi Bilateral China-Vietnam</li> <li>2.2.2 Pendekatan Diplomasi Bilateral China-Filipina</li> <li>2.2.3 Pendekatan Diplomasi Bilateral China-Malaysia</li> <li>2.2.4 Pendekatan Diplomasi Bilateral China-Brunei Darussalam</li> </ul>
<b>BAB III</b> <b>Analisa</b> <b>Pendekatan</b> <b>Diplomasi</b> <b>Bilateral China</b> <b>sebagai</b> <b>Penyelesaian</b> <b>Konflik LCS</b>	3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Strategi Pendekatan Diplomasi Bilateral China <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1.1 Kapabilitas Negara</li> <li>3.1.2 Persepsi Elit</li> <li>3.1.3 Strategi Negara-Bangsa Lain</li> <li>3.1.4 Struktur Sistem Internasional</li> </ul> 3.2 Pendekatan Diplomasi Bilateral sebagai Perwujudan Terciptanya Interaksi <i>Leadership Strategy</i> China dalam Konflik LCS
<b>BAB IV</b> <b>Penutup</b>	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran